

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

SILABUS

Mata Kuliah : Kebijakan dan Manajemen Keuangan Publik

Kode : MAP 534

Dosen : Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

LATAR BELAKANG

Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan bekal teori, analisis, maupun keterampilan teknis yang berkaitan dengan kebijakan keuangan publik di Indonesia. Sebagai mata kuliah pilihan untuk mahasiswa MAP semester ke-2, peserta kuliah tentunya sudah mendapatkan bekal teoretis mengenai Kebijakan Publik, Ekonomi Sektor Publik atau mata kuliah pilihan lain seperti Isu dan Kebijakan Desentralisasi, yang kesemuanya akan relevan dengan mata kuliah ini. Untuk itu referensi pada kuliah-kuliah tersebut menjadi dasar yang penting dalam mengikuti mata kuliah Kebijakan dan Manajemen Keuangan Publik.

Ada tiga hal penting yang mempengaruhi pokok pembahasan mengenai politik fiskal dan pembiayaan sektor publik di Indonesia sekarang ini, yaitu: 1) mekanisme politik dalam pembuatan kebijakan fiskal maupun moneter, 2) kebijakan desentralisasi fiskal, dan 3) efektivitas pembiayaan publik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dua hal yang pertama adalah merupakan konsekuensi logis dari sistem politik kita yang semakin demokratis. Kebijakan fiskal, misalnya, bukan lagi menjadi monopoli dari pemerintah sebagai lembaga eksekutif, tetapi juga harus melibatkan unsur legislatif serta unsur-unsur kekuatan politik lainnya. Sementara itu, seiring dengan kebijakan desentralisasi, format kebijakan pada tingkat pusat dan daerah kini mengalami perubahan sehingga menuntut pemahaman mengenai isu politik maupun ekonomi yang makin kompleks. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dapat dicapai sesuai dengan tuntutan sistem administrasi publik yang modern dan responsif.

Agar kuliah dapat berjalan secara inter-aktif, karyasiswa diharapkan aktif mencari sumber referensi secara mandiri. Selain sumber-sumber referensi yang sudah terdapat di dalam silabus, para karyasiswa diharapkan menggali sumber-sumber informasi yang lain, baik melalui Internet, kumpulan artikel, serta tulisan-tulisan aktual yang selanjutnya bisa diangkat sebagai kasus dalam diskusi di kelas.

SISTEM EVALUASI

Evaluasi terhadap karyasiswa peserta kuliah ini didasarkan pada tiga kriteria pokok, yaitu:

1. Partisipasi di dalam diskusi kelas
2. Pembuatan kertas-kerja atau tugas individual
3. Ujian semester.

RENCANA KULIAH

No.	Topik Perkuliahan	Bacaan Utama
1.	<p>Pengantar Kuliah Dalam sesi awal ini, kuliah menjelaskan silabus dan beberapa kesepakatan tentang sistem perkuliahan serta pendekatan yang akan dipakai di dalam membahas kebijakan keuangan pada tingkat nasional maupun daerah.</p>	Silabus
2.	<p>Kebijakan keuangan publik dari pendekatan ekonomi Membahas fungsi kebijakan fiskal dari literatur ilmu ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan publik.</p>	Tanzi, Public Finance in Developing Countries (1991) Musgrave, Public Finance (1964)
3.	<p>Kebijakan keuangan publik sebagai produk politik Membahas aspek politik dari kebijakan keuangan. Yang hendak diuraikan adalah bahwa sebagai produk politik, kebijakan keuangan tidak akan terlepas dari kedudukan lembaga-lembaga pemerintah, kepentingan aktor kebijakan serta mekanisme pertanggungjawaban diantara lembaga-lembaga tersebut</p>	Anderson, Politics and the Economy (1966) Banfield, Political Influence (1961) Manor, The Political Economy of Democratic Decentralisation (1999) Bahl & Linn, Urban Public Finance in Developing Countries (1992)
4.	<p>Pengendalian inflasi Sebagai unsur pokok kebijakan moneter, pengendalian inflasi adalah salah satu tolok-ukur kinerja penting dari kebijakan publik. Ini sejalan dengan fungsi stabilisasi dari lembaga publik.</p>	Goode, Government Finance in Developing Countries Gunawan, Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia
5.	<p>Kebijakan nilai tukar Sesi ini menguraikan tentang siklus anggaran publik di Indonesia. Namun berbeda dengan pendekatan yang biasa dianut, setiap tahapan dalam siklus anggaran pemerintah pusat atau daerah dipahami sebagai titik pembuatan kebijakan politik.</p>	Imansyah, Krisis Keuangan di Indonesia: Dapatkah Diramalkan? Djiwandono, Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia

6.	<p>Prioritas pembangunan dan keuangan publik Membahas berbagai rumusan prioritas pembangunan nasional dan daerah pada transisi demokrasi serta sistem alokasi anggaran yang relevan.</p>	<p>Bahl & Linn, Urban Public Finance in Developing Countries (1992) Austin, Pragmatism and Public Policy in East Asia</p>
7.	<p>Struktur APBN: Hubungan fiskal antar lembaga pemerintah Menguraikan tentang keterkaitan lembaga pemerintah di dalam sistem anggaran dan kebijakan fiskal yang berlaku. Di tingkat pusat, ini akan menyangkut DPR, lembaga kepresidenan, BPK, Bappenas, Departemen Keuangan, serta departemen teknis lainnya. Di tingkat daerah, ini akan menyangkut DPRD, kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), Biro/Bagian Keuangan, Bappeda, BKP, Bawasda, dan sebagainya.</p>	<p>Ebel, The Economics of Fiscal Decentralisation (2000) Stoker, The Politics of Local Government (1988) Mawhood, Local Government in the Third World (1983)</p>
8.	<p>Isu-isu dalam desentralisasi fiskal Sesi ini membahas tentang berbagai macam kebijakan baru tentang desentralisasi fiskal, seperti yang tertuang dalam UU No.32/2004, No.33/2004, UU No.28/2009 beserta permasalahan yang timbul dari kebijakan tersebut.</p>	<p>Cheema & Rondinelli, Decentralisation and Development (1983) Bird & Vaillancourt, Fiscal Decentralisation in Developing Countries (1998) Kumorotomo, Desentralisasi Fiskal (2008)</p>
9.	<p>Aktor dan perumus kebijakan fiskal Membahas mengenai posisi aktor politik dan perumus kebijakan fiskal beserta berbagai kepentingan individu maupun institusional yang melatarbelakanginya. Uraian ditekankan pada hubungan fiskal antar lembaga setelah dilaksanakannya kebijakan desentralisasi.</p>	<p>Chandler, Public Policy-Making for Local Government (1988) MacAndrews, Central Government and Local Development in Indonesia (1986)</p>
10.	<p>Tugas-tugas penerimaan (<i>revenue assignments</i>) Membahas sisi penerimaan dari anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembahasan lebih rinci akan dilakukan dalam dua sesi kuliah berikutnya.</p>	<p>Devas, Financing Local Government in Indonesia (1989) Uppal, Taxation in Indonesia (1991)</p>

11.	Politik perpajakan Menguraikan penjelasan politis terhadap kebijakan penerimaan pemerintah dari pajak.	Manor, The Political Economy of Democratic Decentralisation (1999)
12.	Pendapatan non-pajak dan retribusi Menguraikan penjelasan politis terhadap kebijakan penerimaan pemerintah dari sumber-sumber non-pajak, retribusi, pinjaman LN, dan sebagainya.	Mahi, Pendapatan Daerah dan Desentralisasi Fiskal (2001)
13.	Tugas-tugas pembelanjaan (<i>expenditure assignments</i>) Membahas sisi pembelanjaan atau pengeluaran dari anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembahasan lebih rinci akan dilakukan dalam dua sesi kuliah berikutnya.	Simanjuntak, Pembiayaan Pembangunan Daerah (2001) Mardiasmo, Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (2002)
14.	APBN dan APBD: Dana teknis departemen, DAU, bagi hasil dan alokasi pajak daerah Menguraikan tentang sistem alokasi anggaran kepada departemen, alokasi DAU kepada daerah, bagi hasil pusat-daerah, serta proporsi alokasi pajak untuk pemerintah daerah. Uraian terutama dikaitkan dengan hubungan antar lembaga pemerintah secara vertikal maupun horisontal.	Mahi & Brojonegoro, Dana Alokasi Umum (2002)
15.	Anggaran daerah: Masalah kualitas belanja (<i>quality spending</i>) Menguraikan tentang struktur APBD, peran sektor publik di daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah.	Hill, Intra-Country Regional Disparities (2000) Davey, Financing Local Development in Indonesia (1984)
16.	Pertanggungjawaban keuangan dan anggaran publik Membahas tentang sistem pertanggungjawaban keuangan di sektor publik, terutama kaitan antara lembaga-lembaga eksekutif dengan pemeriksa dan lembaga legislatif.	Hill, Intra-Country Regional Disparities (2000) King, Local Government Economics in Theory and Practice

DAFTAR REFERENSI

1. Anonymous, Fiscal Decentralization in Indonesia: A Decade After Big Bang, Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance Republic of Indonesia, UI Press, Jakarta, 2012
2. Ahmad, Estisham and Russell Krelove, Tax Assignments: Options for Indonesia, World Bank paper, 1999
3. Ananta, Aris, Muljana Soekarni & Sjamsul Arifin (eds.), The Indonesian Economy: Entering A New Era, ISEAS, Singapore, 2011
4. Anderson, James E., Politics and the Economy, Little, Brown and Company, Boston, 1966
5. Austin, Ian, Pragmatism and Public Policy in East Asia: Origins, Adaptations and Developments, Fairmont International, Singapore, 2001
6. Bahl, Roy and Johannes Linn, Urban Public Finance in Developing Countries, Oxford University Press, New York, 1992
7. Banfield, Edward C., Political Influence, The Free Press, New York, 1961
8. Bird, Richard M. & Francois Vaillancourt, Fiscal Decentralization in Developing Countries, Cambridge University Press, 1998
9. Breul, Jonathan D. & Carl Moravitz (eds.), Integrating Performance and Budgets, Rowman & Littlefields, New York, 2007
10. Buchanan, James M., The Economics of Politics, Institute of Economic Affairs, London, 1978
11. Chandler, J.A., Public Policy-Making for Local Government, Croom Helm, London, 1988
12. Cochran, Charles L. & Eloise F. Malone, Public Policy: Perspectives and Choices, McGraw-Hill, Boston, 1999
13. Devas, Nick et al, Financing Local Government in Indonesia, Ohio Centre for International Studies, Ohio, 1989
14. Djiwandono, Soedradjad J., Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001
15. Eaton, Kent, Political and Obstacle to Decentralisation: Evidence from Argentina and the Philippines, in Development and Change, Vol.32 No.1, Institute of Social Studies, January 2000
16. Ebel, Robert, The Economics of Fiscal Decentralization, World Bank paper, 2000
17. Goode, Richard, Government Finance in Developing Countries, The Brooking Institutions, Washington D.C., 1984
18. Gunawan, Anton Hermanto, Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1991
19. Hall, Robert E. & John B. Taylor, Macroeconomics, W.W. Norton & Company, New York, 1991
20. Hill, Hall, Intra-Country Regional Disparities, The Second Asian Development Forum, Singapore, 2000
21. Imansyah, Muhammad Handry, Krisis Keuangan di Indonesia: Dapatkah Diramalkan?, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009
22. Kelly, Janet M. & William C. Riverbank, Performance Budgeting for State and Local Government, M.E. Sharpe, New York, 2011
23. King, David (ed.), Local Government Economics in Theory and Practice, Routledge, London, 1992
24. Kitunzi, Anka, Fiscal Decentralization in Developing Countries: An Overview, World Bank paper, 2000

25. Kumorotomo, Wahyudi & Erwan Agus Purwanto (eds.), *Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya*, MAP-UGM, Jogjakarta, 2005
26. Kumorotomo, Wahyudi, *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*, Prenada Media, Jakarta, 2008
27. Kunarjo, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, UI-Press, Jakarta, 1996
28. Ladd Helen F., *The Challenge of Fiscal Disparities for State and Local Governments*, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 1999
29. MacAndrews, Colin (ed.), *Central Government and Local Government in Indonesia*, East Asian Social Science Monographs, Oxford University Press, Singapore, 1986
30. Mankiw, Gregory N., Euston Quah & Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Makro*, Penerbit Salemba Empat & CENGAGE Learning, Jakarta, 2012
31. Manor, James, *The Political Economy of Democratic Decentralisation*, The World Bank, Washington, 1999
32. McDonald, Terrence and Sally K. Ward, *The Politics of Urban Fiscal Policy*, Social Science History Association, Sage Publication, California, 1984
33. McLure, Charles E. (ed.), *Tax Assignment in Federal Countries*, ANU Press, Canberra, 1983
34. Peters, Guy B., *American Public Policy: Promise and Performance*, Chatham House Publishers, Inc., New Jersey, 1996
35. Prawiro, Radius, *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1998
36. Rubin, Irene S., *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*, CQ Press, Washington D.C., 2006
37. Searle, R.J., *Decentralisation, Intergovernment Grants and Equalisation*, seminar paper, University of Indonesia, 2000
38. Simanjuntak, Timbul H. & Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit RAS, Jakarta, 2012
39. Smoke, Paul, *Reforming Local Government in Developing Countries*, HIID Conference on Economic Policy Reform in Developing Countries, Morocco, 1988
40. Spahn, Paul Bernd, *Intergovernmental Relations, Macroeconomic Stability, and Economic Growth*, World Bank Institute, 1999
41. Subiyantoro, Heru and Singgih Riphath (eds.), *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2004
42. Tanzi, V., *Fiscal Federalism and decentralization: a Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects*, in M. Bruno & B. Pleskovic (eds.), *Annual World Bank Conference on Development Economics*, Washington D.C., 1996
43. Tedjakusuma, Edi Effendi, *Analysis of the Impacts of Fiscal Decentralisation on Regional Development in Indonesia*, Unpublished PhD Thesis, Nagoya University, 2000
44. Uppal, J.S., *Taxation in Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991
45. Urrutia, Miguel, Shinichi Ichimura & Setsuko Yukawa (eds.), *The Political Economy of Fiscal Policy*, UNU Press, Tokyo, 1989.
